

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsepsi otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia menggunakan prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Pinsip otonomi seluas-luasnya dapat dimaknai sebagai kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk membuat kebijakan yang dianggap benar dan adil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik

dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah yang diharapkan bermuara pada cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain prinsip pemberian otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat, diberlakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan pemberian prinsip otonomi yang nyata adalah bahwa kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi obyektif suatu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah di masing-masing daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan otonomi daerah tidak boleh dilepaskan dari tujuan otonomi daerah yakni mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan oleh karena itu, senantiasa harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di daerah masing-masing.

Tujuan pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaligus merupakan pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas Tujuan Nasional.

Keberhasilan pembangunan nasional tergantung dari berbagai unsur pendukung salah satunya adalah pembangunan daerah. Keberhasilan daerah dipengaruhi oleh berbagai unsur, salah satunya adalah unsur pembiayaan pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomer 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 Ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai tujuan bernegara.”

Pemerintah Daerah merupakan Komponen bangsa yang dimiliki kontribusi terhadap keberhasilan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah menurut undang-undang keberhasilan Pembangunan Nasional. Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

“Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”

Kecamatan sebagai suatu organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, maka kecamatan menghadapi banyak masalah. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitasnya (asal-

usul, pendidikan, umur maupun kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah maupun banyaknya desa dilingkungan kerjanya. Salah satu implikasi negative dari penafsiran berlebihan dimaksud adalah pengubahan status, fungsi dan kedudukan kecamatan dari organisasi kewilayahan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Berbicara tentang kedudukan kecamatan, dimana UU Nomor 5 Tahun 1974, kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan, sedangkan UU No 22 Tahun 1999, kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.

Dengan demikian, kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan. Camat bukan lagi Kepala Wilayah yang memiliki kewenangan sebagai penguasa wilayah. Menurut UU No 22 Tahun 1999, kecamatan hanyalah merupakan kerja Camat sebagai kepala daerah, artinya kedudukan Camat di kecamatan tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya yang ada di kecamatan seperti kepala Cabang Dinas, kepala UPTD. Sehingga Camat tidak secara otomatis mempunyai kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan umum yang meliputi pengawasan, koordinasi serta kewenangan lainnya. Camat hanya menjalankan tugas pokok sebagai unsure lini yakni “to do, to act” artinya kegiatan Camat beserta jajarannya bersifat operasional, memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Camat tidak lagi memiliki kewenangan atributif melainkan hanya memiliki kewenangan delegatif artinya Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati.

Untuk bisa terwujudnya organisasi pemerintahan yang lebih baik lagi khususnya ditingkat Kecamatan dibutuhkan para pegawai yang selalu siap sedia. Hidayat (2006) mengemukakan dalam bukunya efektifitas yaitu :

- 1 Kualitas
- 2 Kuantitas
- 3 Waktu

Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Menariknya, kebanyakan kegagalan daerah otonom baru ini terkait dengan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, pelayanan infrastruktur, dan peningkatan persaingan usaha seperti peraturan pemerintah daerah terkait dengan perencanaan daerah, forum komunikasi bagi pebisnis dan pemerintah lokal, anggaran bisnis berskala mikro-kecil-dan menengah, serta investasi.

Paradoks tentu terutama di sektor pelayanan publik. Bagaimana tidak, pasca-pembentukan daerah otonom baru yang seharusnya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena jarak semakin dekat, yang berarti pelayanan menjadi semakin cepat, dalam kenyataannya menjadi semakin jauh karena pelayanan menjadi semakin lama

Ditilik lebih jauh, permasalahan yang dihadapi antara lain mahal biaya pelayanan publik, proses yang berbelit-belit, sulit diakses, informasi dan dokumen minim, dan masih ditemukannya praktek pungutan liar. Kondisi ini pun dapat dilihat dari masih banyaknya pengaduan (keluhan) atau pernyataan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah maka kinerja pelayanan publik menjadi titik strategis.

Sebagaimana diuraikan di atas, kondisi buruknya pelayanan publik dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Buruknya pelayanan publik berarti buruknya tata kelola pemerintahan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sebaliknya, pelayanan publik yang baik merupakan pertanda hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik juga (good governance). Tentu saja, pengertian baik yang dimaksud adalah sesuai dengan keinginan rakyat sebagai pemangku kepentingan pelayanan, bukan semata-mata keinginan penguasa pemerintah." bila masyarakat merasakan pelayanan publik yang baik, trust dari masyarakat akan muncul. Sebaliknya, ketidakadilan dalam mendapatkan pelayanan publik yang buruk tentu dapat menurunkan derajat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon belum efektif sebagai mana terlihat :

1. Mengenai lemahnya kinerja pegawai dalam melayani masyarakat.
2. Pegawai kurang disiplin berkaitan dengan ketepatan waktu, baik jam kerja maupun jam pelayanan.
3. Mengenai pegawai yang masih kurang dalam menggunakan alat bantu berupa komputer dan perangkat lain yang menunjang kegiatan pelayanan.
4. Kurangnya Jumlah pegawai dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai.

Berdasarkan masalah-masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas menjelaskan bahwa belum efektifnya kerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kerja pegawai dalam melaksanakan pelayanan publik di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana hambatan dalam menjalankan efektivitas kerja pegawai di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon ?

3. Bagaimana kerja pegawai dalam melayani pelayanan publik terhadap masyarakat ?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan kerja pegawai dalam pelayanan di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon
- 2 Untuk mengetahui hambatan dalam menjalankan efektivitas kerja pegawai di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon
- 3 Untuk mengetahui kerja pegawai dalam melayani pelayanan publik terhadap masyarakat

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara praktis diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah yang terkait, khususnya di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti berikutnya dengan obyek yang sama.
2. Secara praktis diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu administrasi, khususnya terkait dengan teknik kepemimpinan.

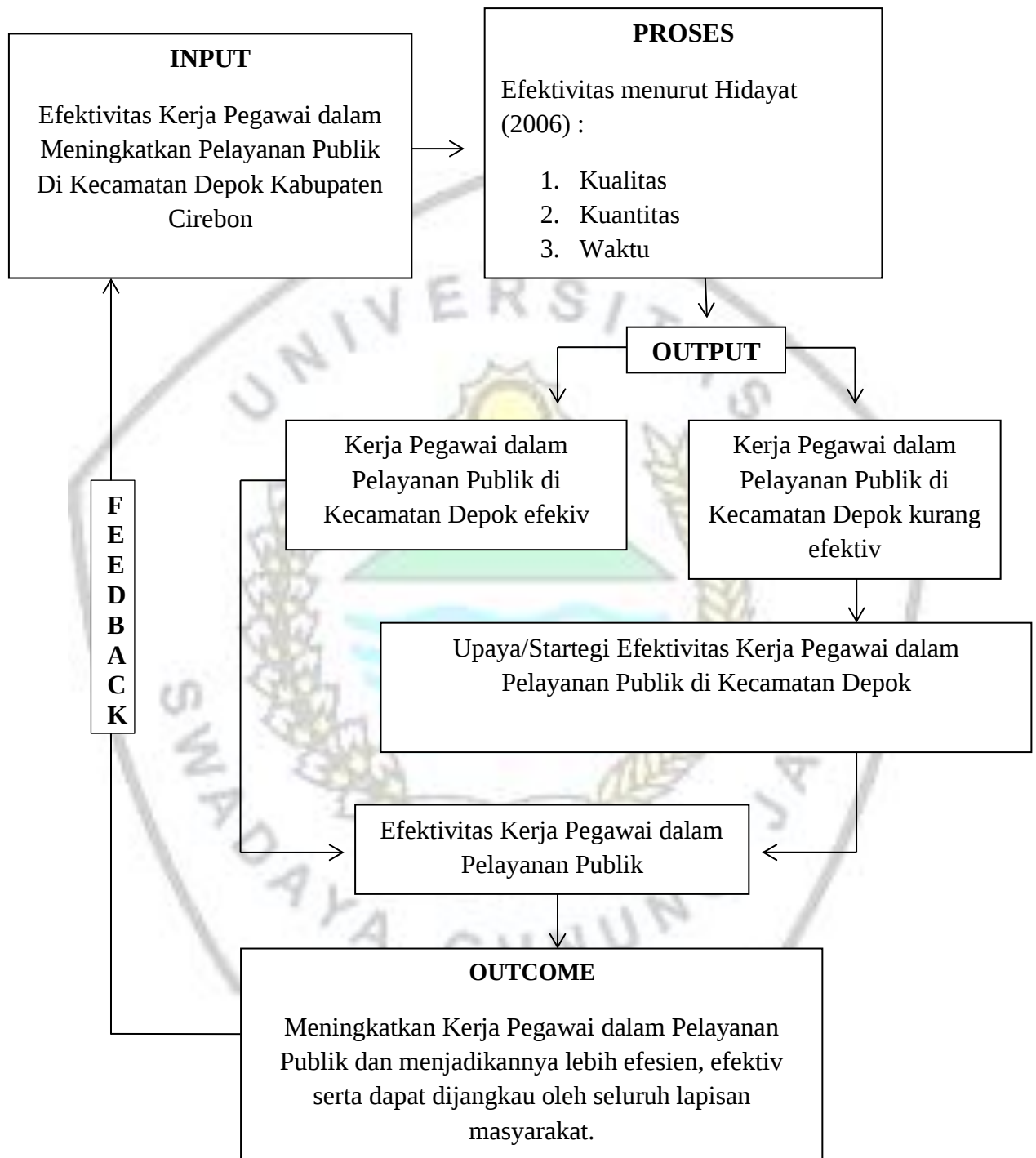
- b. Sebagai bahan latihan bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi publik yang diperoleh selama proses perkuliahan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan Efektivitas menurut H. Emerson : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno Handyaningrat, 1990, hal 15)

Kerangka Pemikiran Efektivitas Kerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon



Gambar.1
Kerangka Pemikiran

1.7 Definisi Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

1. Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.
2. Efektifitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat suatu perbuatan yang dilakukan dalam setiap pekerjaan yang dikehendaki yang dilihat dari segi tujuan dan hasil yang sudah tercapai secara maksimal (Indrawijaya 2010: 176)
3. Brown (dalam Anoraga, 1998) kerja merupakan penggunaan proses mental dan fisik dalam mencapai beberapa tujuan yang produktif.
4. Soedaryono (2000: 6) Menurut Soedaryono, pengertian pegawai adalah seorang yang melakukan penghidupan dengan cara bekerja di dalam kesatuan organisasi baik didalam pemerintah atau swasta.
5. Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong (2007:128), adalah: Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik
6. Kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif negara Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Sebuah kecamatan dipimpin

oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten (kabupaten) atau kota (kota madya). Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat.

1.7.2 Operasional Konsep Penelitian

Tabel 1.1
Operasionalisasi Konsep Penelitian

Konsep / Variabel	Dimensi	Parameter
Efektivitas (Hidayat, 2006)	Kualitas	1. Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan 2. Kemampuan Pegawai dalam menggunakan alat bantu 3. Empati dalam bekerja bersama masyarakat 4. Kemudahan dalam proses pelayanan
	Kuantitas	1. Mengerti akan target pencapaian tugasnya 2. Jumlah pegawai yang memadai 3. Kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan 4. Ketelitian pekerjaan
	Waktu	1. Mengerjakan tugasnya tepat waktu. 2. <i>Standar Operating Procedures</i> 3. Prioritas Waktu 4. Evaluasi Jadwal

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data instrumen dalam Penelitian Kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner.

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informasi

Sampel pada penelitian kualitatif disebut informan atau subjek riset, yaitu orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai sesuai tujuan riset. Disebut subjek riset, karena informan dianggap aktif mengkonstruksi realitas.

Pemilihan informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan keterkaitannya pada tujuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian, informan yang akan dipilih yaitu :

- Camat dan para pegawai sebagai *key informan* (informasi kunci) di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon
- Pak Jejep masyarakat di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sebagai informasi pendukung.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian disesuaikan dengan jenis Penelitian Kualitatif.

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui proses wawancara dengan informan, data sekunder berasal dari dokumen dan foto-foto yang dapat dipergunakan sebagai pelengkap.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui informan. Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang dipandang mengetahui dan mengerti dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat memberikan data yang diperlukan dan dapat dipercaya kebenarannya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah arsip yang diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi, antara lain surat keputusan, Peraturan perundangan, laporan penelitian, data statistik, data kelembagaan (pemerintah dan lembaga lainnya), baik yang terpublikasi maupun yang tidak terpublikasi, dokumen yang

berupa foto-foto, serta nakha-naskah penting lainnya sebagai bahan acuan untuk mendiskripsikan fenomena penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku literatur, arsip, laporan dinas, monografi, internet, peraturan perundangan, serta sumber tertulis lainnya.

2. Observasi

Pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

3. Wawancara

Tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interview*). Wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara si peneliti dan informan.

4. Dokumentasi

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi untuk melengkapi data yang diperoleh dengan adanya suatu foto-foto kegiatan selama penelitian, foto struktur organisasi, dan lain sebagainya.

1.8.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dalam rangka memperoleh data yang dapat dipercaya. Menurut Moeleang (2010: 330), keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data yang diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan data yang diperoleh oleh peneliti. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan cara *check*, *recheck*, dan *cross check* terhadap data itu. Adapun cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan lapangan dan hasil wawancara dengan para informan.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan valid, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informasi dari hasil wawancara.

1.8.5 Analisis Data

Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Analisis data yang dapat dilakukan dalam penelitian adalah teknik analisi data secara deskriptif kualitatif dengan cara menganalisis secara mendalam berbagai data yang diperoleh.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Yaitu pemilihan data yang telah diperoleh, dikumpulkan, kemudian dirinci secara sistematis dan memilih yang pokok-pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga diharapkan memberikan deksripsi dan analisis yang lebih tajam.

2. Display Data

Yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan uraian penjelasan yang bersifat deksriptif.

3. Verifikasi Data

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data tersaji permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.9 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang beralamat di Depok, Kesugengan Lor Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Adanya masalah yang harus dicari permasalahan dan solusinya.
2. Adanya data yang akan mendukung penelitian.

3. Lokasi yang mudah dijangkau peneliti.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian direncanakan selama 7 bulan terhitung dari bulan Maret sampai September 2020, yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu mengenai apa aja masalah – masalah yang sedang hangat dibicarakan di Kota Cirebon yang dapat dijadikan suatu judul skripsi nanti. Kemudian penulis juga melakukan bimbingan kepada Dosen Pembimbing ke – 1 dan ke – 2 apakah judul penelitian disetujui atau tidak.

2. Tahap Pelaksanaan/ Penelitian

Penulis melakukan penelitian dan melakukan wawancara kepada narasumber yang sudah penulis tentukan.

3. Tahap Akhir

Seminar yang diselenggarakan oleh pihak fakultas yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauhmana perkembangan penyusunan skripsi dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan dalam menyusun skripsi.

